

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA  
Jl. Basoeki Rachmat - Larantuka

REKAPITULASI KLASIFIKASI PERKARA PIDANA KHUSUS TERTENTU  
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA  
TAHUN 2016 - 2020

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PIDANA KHUSUS TERTENTU	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>
2	Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi					
3	Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Bea Cukai					
4	Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Bea Cukai					
5	Pendanaan Terorisme					



Mengetahui :  
Ketua

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H.,M.H.  
NIP. 19710117199903 1 002

Larantuka, 15 April 2021  
Panitera

Lahibu Weni  
NIP. 19670617199303 1 005



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Fax. (021) 26273535, Website : www.badilum.info PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 462/DJU/HK00.1/4/2021

Jakarta, 8 April 2021

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI

di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor B/49/PR.03/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, terkait dengan kewajiban Pengadilan untuk mengunggah Putusan pada Direktori Putusan, dengan ini diminta kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk memastikan putusan-putusan sudah terpublikasi pada Direktori Putusan antara lain meliputi:

- a. Putusan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sudah berkekuatan hukum tetap selama tahun 2020.
- b. Putusan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap periode tahun 2016 hingga 2020.
- c. Putusan kasus-kasus untuk Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk periode tahun 2017 hingga 2020.
- d. Putusan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai yang sudah berkekuatan hukum tetap periode tahun 2017 hingga 2020.
- e. Putusan kasus-kasus terkait dengan Pendanaan Terorisme yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk periode tahun 2017 hingga 2020.

Seluruh Putusan tersebut harus sudah terunggah paling lambat tanggal 16 April 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM



PRIM HARYADI

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Yth. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia